

Bab 6

Menelusur Lembaga Negara

Penilaian Sumatif



A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini yang dimaksud kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk
 - a. menetapkan undang-undang
 - b. melaksanakan undang-undang
 - c. mengawasi jalannya peraturan
 - d. mengangkat duta dan konsul
 - e. melakukan hubungan internasional
2. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk
 - a. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
 - b. terjadinya *check and balances* dalam menjalankan kekuasaan
 - c. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
 - d. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
 - e. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan
3. Perhatikan cerita berikut!

Pada pemilu Presiden terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil.

Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara, yaitu **HOTS**

 - a. Komisi Yudisial
 - b. Mahkamah Agung
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat
 - e. Majelis Permusyawaratan Rakyat

4. Lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah
- TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara
 - Polri
 - Kejaksaan
 - Komisi Pemberantasan Korupsi
 - Mahkamah Konstitusi
5. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Faktor penyebabnya kasus tersebut, **kecuali**
- disiplin masyarakat rendah
 - kurang tegasnya penegak hukum
 - rendahnya kesadaran hukum masyarakat
 - banyak liputan media massa tentang kejahatan
 - kurangnya contoh dan keteladanan dari para pemimpin
6. Berikut ini yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara adalah adanya
- lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembaga
 - sifat sepihak dan searah
 - berbagai lembaga kenegaraan
 - lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri
 - penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai salah satu lembaga negara
7. Di bawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah
- UU No. 2 Tahun 2002
 - UU No. 20 Tahun 2003
 - UU No. 30 Tahun 2002
 - UU No. 16 Tahun 2004
 - UU No. 12 Tahun 2006
8. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia adalah
- TNI Angkatan Laut, Darat, dan Udara
 - Polri
 - Kejaksaan
 - Komisi Pemberantasan Korupsi
 - Mahkamah Konstitusi
9. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah
- Mahkamah Agung
 - Mahkamah Konstitusi
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Dewan Perwakilan Daerah
 - Badan Pengawas Keuangan

10. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerja sama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Contoh penerapan kerja sama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah
HOTS
- penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama
 - membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
 - menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran
 - mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia
 - menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi
11. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya bersifat final adalah
- Mahkamah Agung
 - Mahkamah Konstitusi
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Dewan Perwakilan Daerah
 - Badan Pengawas Keuangan
12. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, **kecuali**
- menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
 - memutus sengketa kewenangan lembaga negara
 - membuat partai politik
 - memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
 - memutus pembubaran partai politik
13. Berikut contoh sikap peduli terhadap lembaga di sekolah sebagai cerminan lembaga negara, yakni
- menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas
 - mengikuti pemilihan ketua OSIS di sekolah sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia
 - membuat latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah
 - mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya
 - menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama

14. Kejaksaan di Indonesia disebut dengan *executive ambtenaar* yang mempunyai arti kejaksaan sebagai
- a. pengendali proses perkara pidana
 - b. pengendali proses perkara perdata
 - c. pengendali proses perkara pidana dan perdata
 - d. satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
 - e. satu-satunya instansi pelaksana putusan perdata
15. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah **HOTS**
- a. Dewan Pertimbangan Agung
 - b. Mahkamah Agung
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat
 - d. Badan Pengawas Keuangan
 - e. Dewan Perwakilan Daerah
16. Indonesia tidak menganut ajaran *trias politica* dalam arti pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan sebab
- a. ketiga badan yang memegang kekuasaan itu terdapat hubungan yang bersifat kerja sama
 - b. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif harus tunduk kepada DPR
 - c. ketiga macam kekuasaan itu berada di tangan MPR
 - d. ketiga badan yang memegang kekuasaan itu mempunyai tugas pokok masing-masing
 - e. Indonesia lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan di antara lembaga negara
17. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
- Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia mempunyai tugas, **kecuali**
- a. mengatur dan mengawasi bank
 - b. menetapkan kebijakan moneter
 - c. melaksanakan kebijakan moneter
 - d. lembaga negara yang independen
 - e. mengatur kelancaran sistem pembayaran
18. Amendemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan agenda reformasi di bidang hukum dan salah satu hasilnya adalah berubahnya ketentuan Pasal 1 Ayat (2), yaitu *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR* berubah menjadi *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*. Konsekuensi dari amendemen pasal tersebut adalah **HOTS**
- a. MPR sebagai lembaga tertinggi negara
 - b. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
 - c. keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
 - d. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi oleh rakyat secara langsung
 - e. Presiden memiliki tugas dan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan

19. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan

- a. legislatif
- b. eksekutif
- c. yudikatif
- d. federatif
- e. koordinatif

20. *Perhatikan cerita berikut!*

Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada Presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara.

Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam cerita di atas, yaitu **HOTS**

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- b. Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Mahkamah Agung
- d. Mahkamah Konstitusi
- e. Komisi Yudisial

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan yang Anda ketahui tentang lembaga negara menjalankan fungsi administrasi negara!

2. Sebutkan peran lembaga negara secara umum!

3. Berikan contoh lembaga negara yang berperan di bidang ekonomi!
4. DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara. DPR adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. Mengapa DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden? **HOTS**
5. Bagaimana kedudukan MPR sebelum adanya amendemen UUD NRI Tahun 1945?